

## BAB V

### KESIMPULAN

Usulan pemekaran wilayah pemerintahan Nagari Kambang bermula ketika Pemerintah Kabupaten memberikan peluang untuk melaksanakan pemekaran nagari melalui Perda. Peluang ini pun dilihat oleh beberapa tokoh masyarakat Nagari Kambang dan dimanfaatkan untuk memekarkan pemerintahan Nagari Kambang. Memperhatikan kondisi Nagari pada saat itu, mulai dari wilayah nagari yang terlalu luas dan penduduk yang banyak, mengakibatkan pembangunan tidak merata. Hal ini disebabkan oleh minimnya dana DAUN sehingga tidak mampu untuk mencakup seluruh wilayah nagari.

Selain minimnya dana DAUN, birokrasi juga jauh dari masyarakat yang berada di pinggir nagari, sehingga memunculkan kesulitan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi dari nagari, dan begitu juga dengan pemerintah nagari yang memberikan pelayanan tidak optimal dan lambat karena banyaknya penduduk yang harus dilayani dalam hal pengurusan administrasi. Adanya ketidakpuasan ini mendorong beberapa tokoh masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan mengusulkan pemekaran nagari kepada KAN, setelah adanya beberapa nagari di Pesisir Selatan pada tahun 2004 mengusulkan pemekaran kepada pemerintah kabupaten.

Tahun 2005 menjadi awal dari proses pemekaran nagari, yang dimulai dari beberapa tokoh masyarakat mengusulkan pemekaran KAN dan pemerintah nagari. Selama proses pemekaran, muncul kendala berupa penolakan yang diberikan oleh KAN. KAN, khususnya ninik mamak khawatir akan terpecahnya

monografi/wilayah adat dan kesatuan adat Nagari Kambang jika dilakukan pemekaran nagari. Namun respon tersebut berubah menjadi menerima, setelah disepakati dan ditegaskan bahwa pemekaran ini hanya untuk wilayah administratif saja dan tidak akan mengganggu keutuhan wilayah adat, dan juga dengan memperhatikan banyaknya keuntungan yang akan didapatkan. Hal inilah yang membedakan pemekaran Nagari Kambang dengan pemekaran beberapa nagari di Sumatera Barat yang ikut memekarkan lembaga adatnya. Pada bulan Desember tahun 2005 diusulkan pemekaran Nagari kepada Bupati Pesisir Selatan dan di realisasikan pada tanggal 11 Mei 2009, pemekaran wilayah Nagari Kambang menjadi empat nagari.

Terealisasinya pemekaran Nagari Kambang menjadi empat wilayah pemerintahan nagari, yaitu Nagari Kambang Utara, Kambang Timur, Kambang Tengah, dan Nagari Kambang Barat. Kambang Barat menjadi nagari yang berhadapan langsung dengan laut (Samudera Indonesia) yang menjadikan masyarakatnya dominan sebagai nelayan. Sedangkan tiga lainnya berhadapan langsung dengan bukit barisan sehingga menjadikannya sebagai nagari agraris.

Setelah terbentuknya struktur pemerintahan baru, terdapat perkembangan fisik yang dirasakan oleh masyarakat berupa mulai dibangunnya akses jalan dan pengerasan jalan untuk penghubung antar kampung yang berdampak kepada lancarnya mobilitas masyarakat. Pembangunan irigasi juga mulai dilaksanakan di keempat nagari mengingat dominannya pertanian sawah di Kambang sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi petani. Selain itu, pusat pemerintahan nagari menjadi agak lebih dekat bagi masyarakat, dan pelayanan administrasi dan

penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan lebih menghemat waktu dari sebelumnya.

Pemekaran nagari yang terjadi di Nagari Kambang ini didasarkan kepada pemekaran pemerintahannya saja, sedangkan KAN tidak. Empat wilayah nagari hasil pemekaran tersebut menjadi pemerintahan nagari secara administratif yang otonom. Meskipun terbagi atas empat wilayah administratif, sama sekali tidak mengganggu keutuhan adat atau KAN sebagai lembaga adat Nagari Kambang sejak dahulunya. Ketika masyarakat nagari kambang berbicara mengenai adat, mereka menjadi satu kesatuan dan tidak terhalang oleh batas administratif. Empat wilayah administratif tetap disatukan oleh ikatan adat atau KAN.

